



# IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA SEMESTER I TAHUN 2024

**TAHUN 2024**

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI.....	2
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN.....	3
BAB I INFORMASI UMUM .....	5
A. Dasar Hukum .....	5
B. Struktur Organisasi .....	6
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan .....	7
D. Program Pengawasan dan Realisasinya .....	7
BAB II HASIL PENGAWASAN.....	11
A. Audit .....	12
1. Audit Kinerja dan Audit Operasional .....	12
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) .....	15
B. Reviu .....	20
C. Monitoring atau Pemantauan .....	20
D. Evaluasi.....	20
E. Kegiatan Pengawasan Lainnya .....	20
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT .....	22
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI .....	22
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP .....	22
C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Lainnya .....	22
BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT .....	24
BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI .....	25
A. Simpulan .....	25
B. Hambatan .....	25
C. Rekomendasi .....	26



## RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Berdasarkan data hasil audit yang dilakukan oleh APIP selama satu semester yaitu Semester 1 Tahun 2024 termasuk hasil pemantauan tindak lanjut, diperoleh data sebagai berikut :

- a. Audit Kinerja : 4 LHA
- b. Audit Operasional : 4 LHA
- c. Audit Dengan Tujuan Tertentu : 3 LHA
- d. Selain audit berkala tersebut, terdapat kegiatan pengawasan lain yaitu:
  1. Reviu DAK Fisik
  2. Reviu DAK Non Fisik
  3. Reviu Penyerapan Anggaran (PA)
  4. Reviu DAU Penggajian PPPK
  5. Reviu RKPD 2025
  6. Reviu LKPD 2023
  7. Reviu LPPD Pemkot Yogyakarta Tahun 2023
  8. Catatan Hasil Reviu LPPD 2023
  9. Reviu SILPA Dana BOP Kesetaraan Tahun 2023
  10. Reviu DAU Pendanaan Kelurahan
  11. Reviu DAU Bidang Pendidikan
  12. Reviu DAU Bidang Kesehatan
  13. Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK Kota Yogyakarta TA 2023
  14. Reviu Daftar Penerima Manfaat Sumbangan Rumah Air Limbah Domestik
  15. Reviu RPJPD Tahun 2025-2045
  16. Monitoring Pengendalian Gratifikasi
  17. Monitoring LHKAN
  18. Monitoring P3DN
  19. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi General Tahun 2023
  20. Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2023
  21. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Investasi
  22. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan TW IV Tahun 2023
  23. Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko 2023 dan Reviu Dokumen Manajemen Risiko 2024
  24. Evaluasi Maturitas SPIP Pada Perangkat Daerah Tahun 2022-2023
  25. Evaluasi Perumda BPR Bank Jogja
  26. Penelitian dan Penelaahan Informasi
  27. Layanan Klinik Konsultasi
  28. Pemantauan TLHP Eksternal dan Internal
  29. Sosialisasi Penilaian Maturitas SPIP
  30. Sosialisasi Anti Korupsi
  31. Sosialisasi Startegi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD)
  32. Pendampingan Zona Integritas
  33. Saber Pungli



- e. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, pada tahun 2024 yaitu LHP atas LKPD Tahun 2023 terdapat 9 (sembilan) temuan dan 22 (dua puluh dua) rekomendasi. Seluruh temuan dan rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti dengan meng-*upload* dokumen tindaklanjut pada SIPTL, dengan status 22 (dua puluh dua) rekomendasi sudah sesuai dengan telaah BPK. Berdasarkan hasil pemantauan BPK periode Semester 2 Tahun 2023 yang terbit pada tanggal 5 Januari 2024, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dengan status sesuai sejumlah 1.012 dari 1.050 rekomendasi atau **96,38%**.
- f. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP lainnya yaitu Perwakilan BPKP DIY pada Tahun 2024 terdapat 5 (lima) Evaluasi yang dilakukan pada bidang perencanaan dan penganggaran APBD, Tatakelola Obat Publik dan Isu Kewilayahan Kesehatan, 1 (satu) Verifikasi pada bidang Pencapaian *Disbursement Linked Indicators (DLI) Strengthening National Tuberculosis Response Program For Result-Loan* IBRD No.9464-ID dan 1 (satu) Monitoring pada bidang Efektivitas Pembinaan Kapabilitas APIP dengan 10 (sepuluh) rekomendasi yang sedang dalam proses ditindaklanjuti oleh PD terkait. Pengawasan Inspektorat DIY dan Pengawasan APIP lainnya oleh Inspektorat Kementerian sampai dengan semester I Tahun 2024 belum terdapat laporan hasil pengawasan.

Yogyakarta, 10 JULI 2024  
Inspektur  
  
FITRI PAULINA ANDRIANI, ST  
NIP. 19700327 199503 2 002



## BAB I

### INFORMASI UMUM

#### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

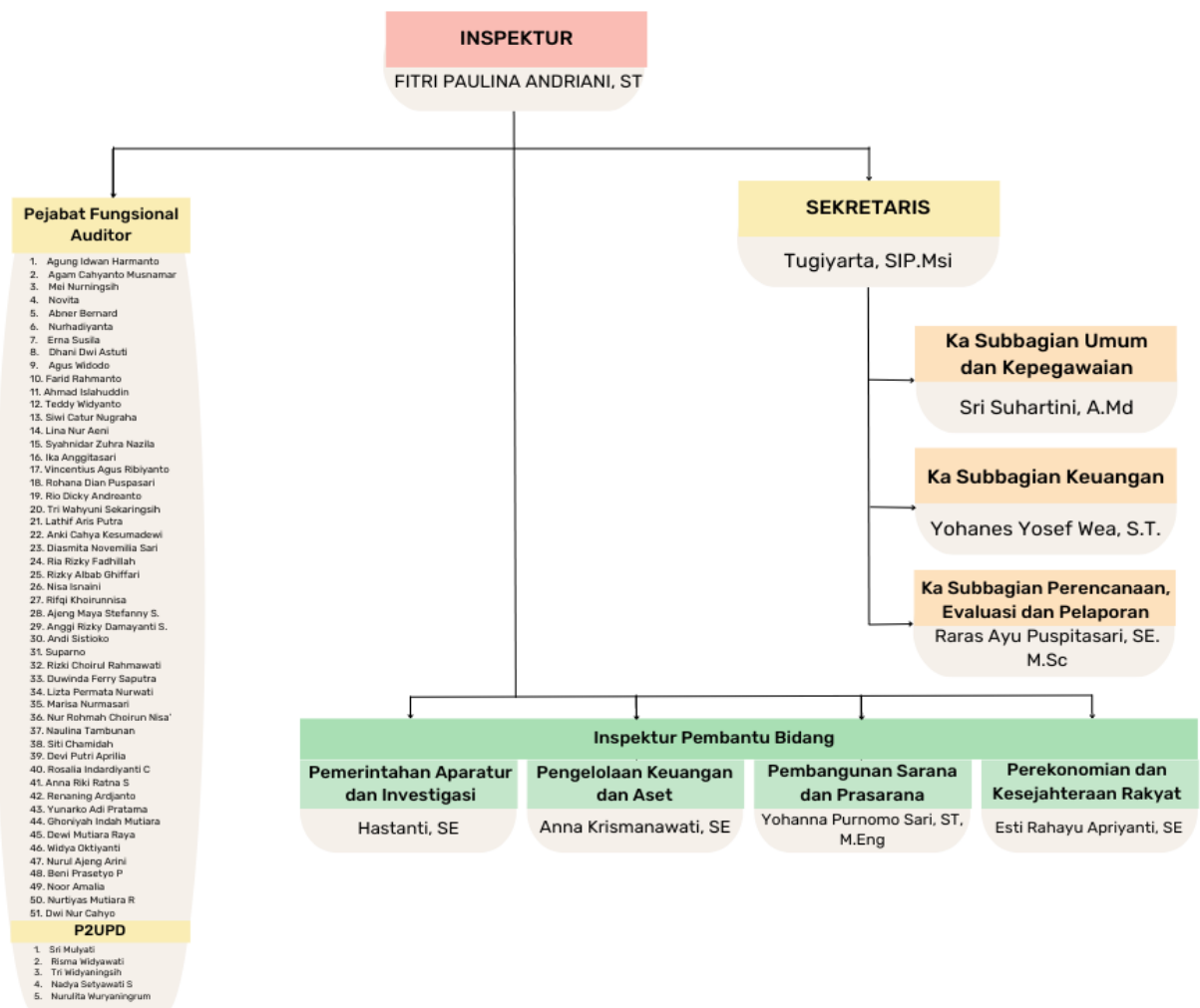


14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;
15. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 484 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahun 2024;
16. Keputusan Inspektur Kota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2024.

**B. Struktur Organisasi**

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Yogyakarta

**C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan**

Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Yogyakarta adalah untuk bahan pelaksanaan evaluasi nasional tentang hasil pengawasan intern dengan tersedianya informasi hasil pengawasan APIP sebagai dasar untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi.

**D. Program Pengawasan dan Realisasinya**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta melaksanakan mandat yang diberikan oleh Pj Wali Kota Yogyakarta, program kerja pengawasan dan realisasi yang sudah dilaksanakan dalam Semester I Tahun 2024 yaitu :

**Tabel 1**  
**Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya**  
**Berdasarkan PKPT dan Non PKPT**  
**Semester I Tahun 2024**

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT		Keterangan
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan		
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yg diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yg diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yg diawasi (Rp)	
1	2	3		4		5	6	7
<b>A</b>	<b>Audit</b>							
	1. Audit Kinerja	4		4				Dalam proses penyusunan
	2. Audit Operasional	4		4				Dalam proses penyusunan
	3. ADTT/PDPT	6		3	30.375.763.759			Terdiri dari ADTT Tematik, Probitiy dan Investigasi.
<b>B</b>	<b>Reviu</b>							
	a. Reviu DAK Fisik	7		7				
	b. Reviu DAK Non Fisik	1		2				
	c. Reviu Penyerapan Anggaran (PA)	2		1				
	d. Reviu DAU Penggajian PPPK	5		5				
	e. Reviu RKPD 2025	1		1				
	f. Reviu LKPD 2023	1		1				



No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT		Keterangan
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan		
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yg diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yg diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yg diawasi (Rp)	
1	2	3		4		5	6	7
	g. Reviu LPPD Pemkot Yogyakarta Tahun 2023	1		1				
	h. Catatan Hasil Reviu LPPD 2023					1		
	i. Reviu SILPA Dana BOP Kesetaraan Tahun 2023	1		1				
	j. Reviu DAU Pendanaan Kelurahan	2		2				
	k. Reviu DAU Bidang Pendidikan	2		2				
	l. Reviu DAU Bidang Kesehatan	3		2				
	m. Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK Kota Yogyakarta TA 2023					1		
	n. Reviu Daftar Penerima Manfaat Sambungan Rumah Air Limbah Domestik					1		
	o. Reviu RPJPD Tahun 2025-2045	1		1				
<b>C</b>	<b>Monitoring</b>							
	a. Monitoring Pengendalian Gratifikasi	1		1				





No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT		Keterangan
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan		
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yg diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yg diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yg diawasi (Rp)	
1	2	3		4		5	6	7
	b. Monitoring LHKAN	1		1				
	c. Monitoring P3DN	1		1				
<b>D</b>	<b>Evaluasi</b>							
	a. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi General Tahun 2023	3		28				3 kegiatan pengawasan, menghasilkan 28 laporan
	b. Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2023	3		19				3 kegiatan pengawasan, menghasilkan 19 laporan
	c. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Investasi	1		1				
	d. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan TW IV Tahun 2023	1		1				
	e. Evaluasi Maturitas SPIP Pada Perangkat Daerah Tahun 2022-2023					1		
	g. Evaluasi Perumda BPR Bank Jogja					1		



No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT		Keterangan
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan		
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yg diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yg diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yg diawasi (Rp)	
1	2	3		4		5	6	7
<b>E</b>	<b>Kegiatan Pengawasan Lainnya</b>							
	a. Penelitian dan Penelaahan Informasi	24		13				
	b. Layanan Klinik Konsultasi	24		4				
	c. Pemantauan TLHP Eksternal dan Internal	1		1				Kegiatan Pemantauan dilaksanakan oleh ke empat bidang, menghasilkan 4 laporan
	d. Sosialisasi Penilaian Maturitas SPIP	1		1				
	e. FGD Strategi OPAD	1		1				
	f. Zona Integritas	1		4				Kegiatan dilaksanakan oleh ke empat bidang
	g. Saber Pungli	6		6				
	<b>Jumlah</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>30.375.763.759</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	

Keterangan: Realisasi audit diisi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan



## BAB II

### HASIL PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta selama Semester I Tahun 2024 berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu :

#### A. Audit

1. Audit Kinerja
2. Audit Operasional
3. Audit Dengan Tujuan Tertentu

#### B. Reviu

1. Reviu DAK Fisik
2. Reviu DAK Non Fisik
3. Reviu Penyerapan Anggaran (PA)
4. Reviu DAU PPPK
5. Reviu Rencana Penggunaan DAU
6. Reviu Penyerapan DAU
7. Reviu DAU Dana Kelurahan
8. Reviu SiLPA BOS PAUD, SD, SMP
9. Reviu Realisasi Penggunaan DAK Bidang Pekerjaan Umum
10. Reviu Realisasi Penggunaan DAK
11. Reviu Rencana Penggunaan DAK Bidang Pekerjaan Umum
12. Reviu Rencana Penggunaan DAK
13. Reviu PBJ
14. Reviu Serapan PBJ
15. Reviu DAU Bidang Kesehatan
16. Reviu RKPD 2025
17. Reviu Pelayanan Publik
18. Reviu LKPD 2023
19. Reviu LPPD
20. Reviu Rancangan Akhir RPJPD

#### C. Monitoring/Pemantauan

1. Monitoring Pengendalian Gratifikasi
2. Monitoring MCP (KPK)
3. Monitoring LHKAN
4. Monitoring P3DN
5. Monitoring Tindak Lanjut

#### D. Evaluasi

1. Evaluasi RB General Perangkat Daerah
2. Evaluasi AKIP Tahap 1 & 2
3. Evaluasi Manajemen Risiko Tahap 1 & 2
4. Evaluasi Manajemen Risiko Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Evaluasi RB General Pemkot & tematik perencanaan (*Ex-ante*)
6. Evaluasi RB
  - a. General Pemerintah Kota Yogyakarta
  - b. Tematik Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Investasi
  - c. Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan



## d. Tematik Peningkatan P3DN, dan Pengentasan Kemiskinan

7. Evaluasi Zona Integritas
8. Evaluasi Mekanisme dan Prosedur

**E. Pengawasan Lainnya**

1. Penelitian dan Penelaahan Informasi
2. Layanan Klinik Konsultasi
3. Pemantauan TLHP Eksternal dan Internal
4. Sosialisasi Zona Integritas
5. Sosialisasi Anti Korupsi
6. Monev Benturan Kepentingan
7. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
8. Sosialisasi OPAD
9. Saber Pungli
10. Pendampingan OPD Mitra

Kelima kelompok kegiatan pengawasan tersebut dirinci sebagai berikut :

**A. Audit****1. Audit Kinerja dan Audit Operasional**

Kegiatan audit kinerja/operasional dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut-atribut temuan hasil audit kinerja/operasional yang meliputi kondisi temuan dan rekomendasi.

- a) **Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok temuan disajikan sesuai Tabel 2 dan Tabel 3.**

**Tabel 2**  
**Temuan Hasil Audit Kinerja**  
**Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta**  
**Semester 1 Tahun 2024**

No	Sub Kelompok Temuan*)	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
	<b>Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan</b>	1.00.00			
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00	-	-	-
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	-	-	-
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	-	-	-
4	Administrasi	1.04.00	-	-	-
5	Indikasi tindak pidana	1.05.00	-	-	-
	<b>Subtotal Kejadian</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>	2.00.00			
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan	2.01.00	-	-	-



No	Sub Kelompok Temuan*)	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
	Pelaporan				
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	-	-	-
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	-	-	-
	<b>Subtotal Kejadian</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Temuan 3 E</b>	3.00.00			
1	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	3.01.00	-	-	-
2	Ketidakefisienan	3.02.00	-	-	-
3	Ketidakefektifan	3.03.00	-	-	-
	<b>Subtotal Kejadian</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jumlah Kejadian</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabel 3**  
**Temuan Hasil Audit Operasional**  
**Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta**  
**Semester 1 Tahun 2024**

No	Sub Kelompok Temuan*)	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
	<b>Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan</b>	1.00.00			
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00	-	-	-
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	-	-	-
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	-	-	-
4	Administrasi	1.04.00	-	-	-
5	Indikasi tindak pidana	1.05.00	-	-	-
	<b>Subtotal Kejadian</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>	2.00.00			
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan	2.01.00	-	-	-
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	-	-	-
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	-	-	-
	<b>Subtotal Kejadian</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Temuan 3 E</b>	3.00.00			
1	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	3.01.00	-	-	-
2	Ketidakefisienan	3.02.00	-	-	-
3	Ketidakefektifan	3.03.00	-	-	-
	<b>Subtotal Kejadian</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



No	Sub Kelompok Temuan*)	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
	<b>Jumlah Kejadian</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

b) Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok rekomendasi disajikan sesuai Tabel 4 dan Tabel 5.

**Tabel 4**  
**Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja**  
**Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta**  
**Semester 1 Tahun 2024**

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat	01	-	-	-
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	02	-	-	-
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	03	-	-	-
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	04	-	-	-
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	05	-	-	-
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	06	-	-	-
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	07	-	-	-
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	08	-	-	-
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	09	-	-	-
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	10	-	-	-
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	11	-	-	-
12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	12	-	-	-
13	Pelaksanaan sosialisasi	13	-	-	-
14	Lain-lain	14	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Tabel 5**  
**Rekomendasi Temuan Hasil Audit Operasional**  
**Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta**  
**Semester 1 Tahun 2024**

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat	01	-	-	-
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	02	-	-	-
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	03	-	-	-
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	04	-	-	-
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	05	-	-	-
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	06	-	-	-
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	07	-	-	-
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	08	-	-	-
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	09	-	-	-
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	10	-	-	-
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	11	-	-	-
12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	12	-	-	-
13	Pelaksanaan sosialisasi	13	-	-	-
14	Lain-lain	14	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Audit dengan tujuan tertentu dilakukan berdasarkan kode etik, standar audit dan dirinci sesuai jenis auditnya. Selama Semester 1 Tahun 2024 ADTT yang dilaksanakan yaitu bersifat tematik 1 (satu) audit berupa audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Center, probity 1 (satu) audit berupa audit Probity terhadap Persiapan (Reviu HPS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Taman Budaya Embung Giwangan Tahap II TA 2024 dan 1 (satu)



Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu berupa Evaluasi Perumda BPR Bank Jogja. Rekomendasi yang diberikan masih dalam proses di tindak lanjuti oleh Perangkat Daerah.

**Tabel 6**  
**Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit**  
**Semester 1 Tahun 2024**

No	Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu	PKPT		Non PKPT
		Target Audit	Realisasi Audit	Realisasi Audit
		Jumlah OP	Jumlah OP	Jumlah OP
<b>A</b>	<b>Tematik</b>			
1.	Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan dan aset	2	1	0
2.	Audit atas hal-hal lain di bidang pemerintahan dan aparatur	0	0	0
3.	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0
4.	Audit atas hal-hal lain di bidang sarana dan prasarana	1	1	0
5.	Audit atas hal-hal lain di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat	0	0	0
<b>B</b>	<b>Probitiy</b>	1	1	0
<b>C</b>	<b>Khusus/Investigasi</b>	0	0	0

Keterangan:

Realisasi audit diisi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan.

Untuk audit investigatif dapat dilaporkan hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam tabel 7.

**Tabel 7**  
**Jumlah Objek Audit Investigatif**  
**Semester 1 Tahun 2024**

Keterangan	Jumlah
Jumlah objek audit investigatif	0
Jumlah audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	0
% audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	0





Hasil audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilimpahkan ke Instansi Penyidik dilaporkan sebagaimana tabel 8.

**Tabel 8**  
**Audit Investigatif yang Dilimpahkan ke Instansi Penyidik**  
**Semester 1 Tahun 2024**

Instansi Penyidik	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara*)	
			Rupiah	Valas**)
Kepolisian				
Kejaksaan	NIHIL			
KPK				
Jumlah				

\*) yang dimaksud dengan potensi kerugian negara adalah nilai kerugian negara yang mungkin akan ditimbulkan.

\*\*\*) diawali dengan simbol mata uang valuta asing (valas)

Tindak lanjut kasus oleh instansi penyidik atas kasus yang dilimpahkan ke instansi penyidik dapat dilaporkan sebagaimana Tabel 9.

**Tabel 9**  
**Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik**  
**Semster 1 Tahun 2024**

Status	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara*)		Keterangan
			Rupiah	Valas**)	
Penyelidikan					
Penyidikan	NIHIL				
Dihentikan					
Dilimpahkan ke pengadilan					
Penuntutan					
Diputus*)					
<b>Jumlah</b>					

\*) jika sudah diputuskan oleh pengadilan maka potensi kerugian diisi dengan nilai putusan final pengadilan

\*\*\*) diawali dengan simbol mata uang valuta asing (valas)



**Tabel 10**  
**Temuan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu**  
**Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta**  
**Semster 1 Tahun 2024**

No	Sub Kelompok Temuan*)	Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan</b>	1.00.00		
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00	-	-
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	-	-
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	-	-
4	Administrasi	1.04.00	-	-
5	Indikasi tindak pidana	1.05.00	-	-
	<b>Subtotal Kejadian</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>	2.00.00		
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01.00	-	-
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	-	-
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	-	-
	<b>Subtotal Kejadian</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Temuan 3 E</b>	3.00.00		
1	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	3.01.00	-	-
2	Ketidakefisienan	3.02.00	-	-
3	Ketidakefektifan	3.03.00	-	-
	<b>Subtotal Kejadian</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jumlah Kejadian</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabel 11**  
**Rekomendasi Temuan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu**  
**Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta**  
**Semester 1 Tahun 2024**

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Kode	Jumlah Kejadian	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat	01	-	-
2	Pengembalian barang kepada	02	-	-



No	Sub Kelompok Rekomendasi	Kode	Jumlah Kejadian	Nilai Temuan (Rp)
	negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat			
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	03	-	-
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	04	-	-
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	05	-	-
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	06	-	-
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	07	-	-
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	08	-	-
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	09	-	-
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	10	-	-
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	11	-	-
12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	12	-	-
13	Pelaksanaan sosialisasi	13	-	-
14	Lain-lain	14	-	-

Tabel 12

## Kode Etik dan Standar Audit yang digunakan

Kode etik dan standar audit	Dasar peraturan perundang-undangan
Kode Etik APIP	Permenpan PER/04/M.PAN/03/2008
Standar Audit APIP	Permenpan PER/05/M.PAN/03/2008
Kode Etik dan Aturan Perilaku Inspektorat	Keputusan Inspektur Nomor 37 Tahun 2009
Piagam Audit Internal	Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2023

**B. Reviu**

Selama Semester 1 Tahun 2024 telah dilakukan reviu atas Reviu DAK Fisik; Reviu DAK Non Fisik; reviu Penyerapan Anggaran (PA); Reviu DAU Penggajian PPPK; Reviu RKPD 2025; Reviu LKPD 2023; Reviu LPPD Pemkot Yogyakarta Tahun 2023; Catatan Hasil Reviu LPPD 2023; Reviu SILPA Dana BOP Kesetaraan Tahun 2023; Reviu DAU Pendanaan Kelurahan; Reviu DAU Bidang Pendidikan; Reviu DAU Bidang Kesehatan; Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK Kota Yogyakarta TA 2023; Reviu Daftar Penerima Manfaat Sambungan Rumah Air Limbah Domestik dan Reviu RPJPD Tahun 2025-2045. Data yang disampaikan adalah jumlah objek reviu dan jumlah pernyataan reviu untuk masing-masing objek sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 13. Jumlah objek yang direviu merupakan jumlah seluruh entitas akuntansi yang ada di institusi yang menjadi kewajiban APIP.

**Tabel 13**  
**Jumlah Objek Reviu**  
**Semester 1 Tahun 2024**

Keterangan	Jumlah
Jumlah objek yang seharusnya direviu	27
Jumlah objek yang direviu	29

**C. Monitoring atau Pemantauan**

Kegiatan monitoring atau pemantauan yang dilaksanakan pada Semester 1 Tahun 2024 yaitu Monitoring Pengendalian Gratifikasi; Monitoring LHKAN; Monitoring P3DN dan Pemantauan TLHP Eksternal dan Internal.

**D. Evaluasi**

Kegiatan evaluasi yang dilakukan di Semester 1 Tahun 2024 yaitu Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi General Tahun 2023; Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2023; Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Investasi; Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan TW IV Tahun 2023; Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko 2023 dan Reviu Dokumen Manajemen Risiko 2024; Evaluasi Maturitas SPIP Pada Perangkat Daerah Tahun 2022-2023 dan Evaluasi Perumda BPR Bank Jogja.

**E. Kegiatan Pengawasan Lainnya**

Pada Semester 1 Tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, pendampingan dan konsultasi.

1. Sosialisai yang dilaksanakan berupa :
  - a. Sosialisasi Penilaian Maturitas SPIP;
  - b. Sosialisasi Anti Korupsi;
  - c. Sosialisasi Startegi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD).
2. Layanan Konsultasi dilakukan melalui Klinik Konsultasi baik online maupun offline.



**Tabel 14**  
**Jumlah Konsultasi berdasar Tema yang diminta Klien**

No	Tema Konsultasi	Jumlah	Keterangan
1	Manajemen Risiko	0	
2	Pengelolaan Keuangan	3	Sponsorship, P3DN
3	SPIP	0	
4	Kepegawaian	0	
5	Hukuman Disiplin	0	
6	Lain-lain	2	Monitoring Hibah, Perubahan DPA DAK nonfisik, Sisa Anggaran Lelang
<b>Total Jumlah</b>		<b>5</b>	

Selain kegiatan diatas, juga dilaksanakan penilaian Maturitas SPIP pada level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Nilai Maturitas SPIP pada level Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sebesar **3,319**. Pada Maturitas SPIP level Perangkat Daerah secara umum sudah berada di rata-rata **level 3** atau **terdefinisi**.

**Tabel 15**  
**Jumlah Objek Audit/Evaluasi yang telah/belum menerapkan SPI Semester 1 Tahun 2024**

Keterangan	Jumlah
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	41
Jumlah objek yang telah menerapkan SPIP sesuai ketentuan (nilai 3)	18
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan (nilai <3)	23

**F. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Peningkatan Kapasitas SDM dilakukan dengan pengiriman peserta diklat, penyelenggaraan diklat dan pelatihan di kantor sendiri.

**Tabel 16**  
**Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas SDM Semester 1 Tahun 2024**

No	Kegiatan	Belanja (Rp)		Keluaran			Ket.
		Anggaran (BKPSDM)	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	
1.	Diklat auditor	725.000.000,-	350.050.000,-	145	153	Orang	-
2.	PKS	13.050.000,-	4.488.000,-	11	4	keg	-

**BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT****A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI****1. Tahun 2024**

No.	Nama	Kerugian Negara/Daerah (Rp)	Penyelesaian Kerugian Daerah (Rp)	Saldo (Rp)	Status
1.	LKPD Th. 2023	0	0	0	Selesai

**2. Tahun 2023 dan pending Tahun sebelumnya**

No.	Nama	Kerugian Negara/Daerah (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)	Status
1.	LKPD Th. 2022	466.742.328,67	466.742.328,67	0	Selesai
2.	LKPD Th. 2021	827.692.579,92	827.692.579,92	0	Selesai
3.	LKPD Th. 2005	144.024.461	75.000.000	69.024.461	Belum Selesai
4.	Belanja Daerah TA 2003 dan 2004	5.469.394.100	2.896.453.588	2.572.940.512	Belum Selesai

**B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP**

Hasil audit internal yang dilakukan di semester I tahun 2024 terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

**Tabel 17**  
**Jumlah Temuan dan Rekomendasi Kerugian**  
**Semester 1 Tahun 2024**

NO	NAMA AUDIT	Perangkat Daerah / Unit Kerja	KERUGIAN (Rp)	JUMLAH SETORAN (Rp)	SISA ANGSURAN (Rp)	KET.
<b>I.</b>	<b>Audit Operasional/Kinerja</b>					
1	Audit Kinerja	NIHIL	-	-	-	-
	Sub Jumlah	0	-	-	-	-
2	Audit Operasional	NIHIL	-	-	-	-
	Sub Jumlah					
<b>II.</b>	<b>ADTT</b>					
1	Tematik	NIHIL	-	-	-	-
2	Probity	NIHIL	-	-	-	-
3	Kasus/Investigasi	NIHIL	-	-	-	-
	Sub Jumlah		0	0	0	-
<b>JUMLAH</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Lainnya**

NO	NAMA APIP	JENIS PENGAWASAN	KERUGIAN	JUMLAH SETORAN	SISA ANGSURAN	KET.
----	-----------	------------------	----------	----------------	---------------	------



	<b>LAINNYA</b>					
1	Inspektorat DIY	-	-	-	-	-
2	BPKP Perwakilan DIY	-	-	-	-	-

**BAB IV****HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

Seluruh pengaduan masyarakat yang masuk melalui UPIK/JSS maupun surat aduan yang dikirim langsung ke Inspektorat telah ditindaklanjuti dengan kegiatan Penelitian dan Penelaahan Informasi. Sampai dengan semester 1 tahun 2024 ada 25 (dua puluh lima) aduan dari masyarakat yang masuk ke Inspektorat dan ditindaklanjuti dengan 16 (enam belas) penelitian dan penelaahan informasi atas pengaduan dan 1 (satu) penelitian dan penelaahan informasi yang ditingkatkan menjadi audit dengan tujuan tertentu, ada 6 (enam) aduan masih dalam proses tindak lanjut dan 5 (lima) aduan disimpan (*file*) karena tidak berkadar pengawasan.

**Tabel 18**  
**Pengaduan Masyarakat Semester 1 Tahun 2024**

Uraian	Kasus	Tindak lanjut			Dalam Proses	Keterangan
		File	PPI	ADTT		
Melalui UPIK/JSS	3	1	1	1	1	2 Aduan selesai di PPI : 1 ditingkatkan ke ADTT, 1 diberkaskan
Aduan Langsung	9	4	4	1	4	5 Aduan selesai di PPI : 1 ditingkatkan ke ADTT, 4 diberkaskan
Surat Aduan	12	6	2	4	2	10 Aduan selesai di PPI : 2 ditingkatkan ke ADTT, 6 diberkaskan, 2 ditingkatkan ke pengawasan lainnya
Disposisi	1	1	0	0	0	1 Aduan selesai di PPI : 1 diberkaskan
Media Massa	2	1	1	0	1	1 Aduan selesai di PPI : 1 diberkaskan
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	





## BAB V

### SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

#### A. Simpulan

Hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh internal APIP sampai dengan semester 1 tahun 2024 yaitu, 4 (empat) Audit Kinerja, 4 (empat) Audit Operasional, 2 (dua) Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dan 1 (satu) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Dari hasil pengawasan yang dilaksanakan tersebut laporan audit kinerja dan audit operasional masih dalam proses penyusunan dan hal-hal yang perlu diperhatikan maupun saran yang muncul pada audit dengan tujuan tertentu dan pengawasan dengan tujuan tertentu masih dalam proses tindak lanjut oleh auditi/Perangkat Daerah.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh eksternal APIP yakni dilaksanakan oleh BPK Perwakilan DIY sampai dengan Semester 1 Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2023. Sedangkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP lainnya seperti BPKP Perwakilan DIY dilaksanakan evaluasi sebanyak 5 (empat) pada bidang Perencanaan dan Penganggaran; Kesehatan; Usaha dan Investasi; 1 (satu) Verifikasi pada bidang Pencapaian *Disbursement Linked Indicators (DLI) Strengthening National Tuberculosis Response Program For Result-Loan* IBRD No.9464-ID dan 1 (satu) Monitoring pada bidang Pembinaan Kapabilitas APIP, untuk Inspektorat DIY dan Inspektorat Kementerian sampai dengan semester 1 tahun 2024 belum terdapat pengawasan yang dilakukan.

Pengawasan terhadap penanganan pengaduan masyarakat sampai dengan semester 1 tahun 2024 terdapat 27 (dua puluh tujuh) pengaduan oleh masyarakat baik yang diterima secara langsung, melalui aplikasi UPIK JSS maupun melalui media pengaduan yang telah tersedia lainnya dan dari keseluruhan pengaduan tersebut sudah ditindaklanjuti 13 (tiga belas) aduan di *file*-kan, 8 (delapan) aduan diproses melalui penelitian dan penelaahan informasi, 6 (enam) aduan diproses tingkat audit dengan tujuan tertentu dan masih ada 8 (delapan) aduan dalam proses tindak lanjut.

#### B. Hambatan

Beberapa hambatan yang ditemui sampai dengan semester 1 tahun 2024 :

1. Adanya tambahan kegiatan-kegiatan baru yang muncul setelah penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan sifatnya menindaklanjuti amanat regulasi dari Pemerintahan di atasnya baik yang berasal dari kebijakan pusat ataupun kebijakan daerah, sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian penugasan dan distribusi personel dalam penugasan.
2. Kurangnya kesiapan Perangkat Daerah dalam penyediaan kelengkapan dokumen pendukung pengawasan, karena Perangkat Daerah belum sepenuhnya memahami kewenangan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok



dan fungsi pengawasan intern, sebagaimana tercantum pada Piagam Audit Intern.

3. Kendala sistem informasi dalam *update* data tindak lanjut pemeriksaan eksternal.

### **C. Rekomendasi**

Untuk meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan, kami sampaikan rekomendasi kepada Bapak Pj Wali Kota Yogyakarta agar memberikan arahan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mencermati dan melaksanakan Keputusan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2023 tentang Piagam Audit Intern.